

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah sektor industri global yang memiliki signifikansi ekonomi khusus bagi negara-negara berkembang. Menurut laporan tahunan terbaru oleh *World Travel & Tourism Council* (WTTC), kontribusi pariwisata terhadap PDB global tumbuh sebesar 3,2% pada tahun 2012. Angka ini lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan. Khususnya di negara-negara berkembang, pariwisata merupakan sumber pendapatan devisa terpenting kedua setelah ekspor komoditas. Pada 2012, Amerika Latin, Asia, dan Afrika sub-Sahara adalah beberapa negara yang memiliki sektor pariwisata yang paling cepat berkembang, seperti yang dilaporkan WTTC.¹

Terkhusus di Asia Tenggara, pariwisata menjadi salah satu sector penghasil pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ini. Berdasarkan *ASEAN Tourism Strategic Plan* atau Rencana Strategis Pariwisata ASEAN 2016-2025, negara di kawasan telah berjanji bahwa pada tahun 2025, ASEAN akan menjadi tujuan wisata berkualitas yang menawarkan pengalaman yang unik dan beragam, serta akan berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata yang bertanggungjawab,

¹ Floreana Miesen, "Tourism benefits many developing countries not necessarily poor and environment", (2013), diakses melalui <https://www.dandc.eu/en/article/tourism-benefits-many-developing-countries-not-necessarily-poor-and-environment>

berkelanjutan, inklusif dan seimbang, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat ASEAN.²

Salah satu negara ASEAN yang sedang mengembangkan sektor pariwisatanya adalah Myanmar. Hal ini dilakukan Myanmar sehubungan dengan rendahnya angka kunjungan wisatawan ke Myanmar dibanding negara ASEAN lainnya, dimana Myanmar menjadi negara dengan angka kunjungan wisatawan terendah kedua di ASEAN sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Dapat dilihat pada tahun 2009 jumlah wisatawan yang datang ke Myanmar sebanyak 762,547 orang, tahun 2010 sebanyak 791,505 orang, tahun 2011 sebanyak 816,369 orang, dan tahun 2012 sebanyak 1,058,995 orang.³ Meskipun mengalami peningkatan jumlah angka kunjungan, angka ini tetap rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Peningkatan angka kunjungan tersebut dibarengi dengan pertumbuhan sektor pariwisata Myanmar yang lebih baik dan telah diidentifikasi sebagai sector prioritas dalam “Strategi Ekspor” Pemerintah Myanmar. Mengingat beragamnya pengalaman wisata unik yang ditawarkan Myanmar, Myanmar memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.⁴

Sebagai hasil dari reformasi politik dan ekonomi, Republik Persatuan Myanmar menikmati pertumbuhan pariwisata yang belum pernah terjadi sebelumnya. Antara 2011 dan 2012, kedatangan pengunjung meningkat sebesar

²Pamela Victor, “Enhancing the tourism industry in ASEAN”, The Asean Post (2018), diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/theaseanpost.com/article/enhancing-tourism-industry-asean%3famp>

³Ministry of Hotels and Tourism Myanmar, “Myanmar Tourism Master Plan 2013–2020”, Final Draft Report (2013), hal. 4

⁴ Myanmar Centre for Responsible Business, “Myanmar Tourism Sector-Wide Impact Assessment”, Danish Institute for Human Rights and Institute for Human Rights and Business (2015), hal. 1

29,7% dan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Myanmar menerima lebih dari 1 juta pengunjung internasional. Pendorong utama pertumbuhan lainnya termasuk ekspansi cepat dari jadwal penerbangan masuk, memudahkan visa turis, meningkatkan kondisi bisnis dan investasi, dan meningkatnya permintaan untuk perjalanan internasional di antara pasar regional dan jarak jauh.⁵

Namun sebagaimana yang diketahui, Myanmar adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang rawan konflik. Konflik yang terjadipun berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti perang saudara antara pemerintah (terutama etnis Burma) dengan banyak etnis minoritas di daerah-daerah terpencil, sebut saja perang yang sedang berlangsung di Negara Bagian Kachin, kekerasan komunal di Negara Bagian Rakhine, perampasan tanah yang meluas dan pelanggaran terus-menerus terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Ketidakstabilan yang terjadi di Myanmar tentu tidak akan menjamin kepuasan wisatawan karena akan mengurangi akses wisatawan ke daerah yang ingin mereka datangi. Masalah-masalah keamanan Myanmar kemungkinan akan bertindak sebagai penghalang bagi banyak wisatawan yang berusaha menjelajah Myanmar. Hal ini tentunya akan berimbas pada menurunnya angka wisatawan yang berkunjung ke Myanmar.⁶

Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Myanmar telah memprioritaskan pengembangan pariwisata dalam Kerangka Reformasi Ekonomi dan Sosialnya, yang dibuktikan dengan pernyataan sebagai berikut:

“Tourism is potentially one of Myanmar’s most important sectors, with tremendous potential to contribute to greater business opportunities and

⁵ Ministry of Hotels and Tourism Myanmar, “Myanmar Tourism Master Plan 2013–2020”, Final Draft Report (2013), hal. 4

⁶ Ko Ko Thett, “Responsible Tourism in Myanmar: Current Situation and Challenges”, Burma Center Prague (2012), hal. 20-21

balancing social and economic development if properly managed and developed. The Government of Myanmar will also ensure that a comprehensive tourism strategy is developed which is commensurate with the cultural and customary practices of local communities as well as the environmental and social endowment of the country”.

Untuk membantu memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang luas dan merata, Pemerintah Myanmar mengadopsi *Myanmar Responsible Tourism Policy* atau Kebijakan Pariwisata Bertanggung Jawab Myanmar pada tahun 2012. Kebijakan ini juga didukung oleh *Myanmar Tourism Federation* (MTF), dan sangat diakui oleh masyarakat sipil dan mitra pembangunan.⁷ Visi pariwisata di Myanmar, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pariwisata yang Bertanggung Jawab adalah:

“kami bermaksud menggunakan pariwisata untuk menjadikan Myanmar tempat yang lebih baik untuk ditinggali, untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang bisnis yang lebih besar bagi semua orang, untuk berkontribusi pada konservasi warisan alam dan budaya serta untuk berbagi keanekaragaman budaya Myanmar yang kaya. Kami dengan hangat menyambut mereka yang menghargai dan menikmati warisan kami, cara hidup kami, dan yang berkunjung dengan hormat.”⁸

Dalam konteks ini, Kementerian Hotel dan Pariwisata yang merupakan badan yang diberi mandat oleh Pemerintah Myanmar untuk mengawasi pengembangan sistematis pariwisata telah menyiapkan Rencana Induk Pariwisata Myanmar (*Myanmar Tourism Master Plan*). Master Plan mengadopsi visi ini untuk pariwisata di Myanmar dan Sembilan tujuan dari Kebijakan Pariwisata Bertanggung Jawab Myanmar sebagai pedomannya. Prinsip-prinsip ini menetapkan program strategis, proyek prioritas, dan kegiatan dalam kerangka

⁷ Ministry of Hotels and Tourism Myanmar, “Myanmar Tourism Master Plan 2013–2020”, Final Draft Report (2013), hal. 12

⁸ Ministry of Hotels and Tourism Myanmar, “Myanmar Tourism Master Plan 2013–2020”, Final Draft Report (2013), hal. 23

kerja implementasi jangka panjang untuk tahun 2013-2020 dan rencana aksi jangka pendek untuk tahun 2013-2015.⁹

Myanmar Tourism Master Plan merupakan kolaborasi antara Pemerintah Myanmar, Pemerintah Norwegia dan *Asian Development Bank*. Tujuan dari Master Plan adalah untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata dalam pembukaan lapangan kerja nasional dan peningkatan pendapatan negara, serta memastikan bahwa manfaat sosial dan ekonomi dari pariwisata didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Master Plan Pariwisata mencakup 38 proyek yang diusulkan langsung oleh anggota Federasi Pariwisata Myanmar, Serikat Pekerja, badan negara bagian dan kawasan, NGO, dan mitra pembangunan. Perkiraan biaya untuk semua proyek berjumlah \$ 486,7 juta. 21 diantara 38 proyek tersebut dengan perkiraan biaya indikatif sebanyak \$ 201,5 juta telah diidentifikasi sebagai proyek prioritas yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Master Plan Pariwisata.¹⁰

Investasi tambahan yang direncanakan oleh Pemerintah Myanmar untuk sektor transportasi dan infrastruktur lainnya bertujuan untuk memberikan manfaat signifikan lebih lanjut bagi industri pariwisata dan mendorong pertumbuhan pengunjung ke Myanmar. Master Plan Pariwisata 2013-2020 telah menetapkan target tinggi yaitu sebanyak 3,01 juta pengunjung internasional pada tahun 2015 dan 7,48 juta pada tahun 2020. Berdasarkan skenario pertumbuhan ini, penerimaan pariwisata diproyeksikan meningkat dari *baseline* \$534 juta pada

⁹ Sitta Kongsasana, "The study of Myanmar Tourism Master Plan 2013 – 2020", Silpakorn University (2014), hal. 6-7

¹⁰ Ministry of Hotels and Tourism Myanmar, "Myanmar Tourism Master Plan 2013–2020", Final Draft Report (2013), hal. 41

tahun 2012, menjadi \$10,18 miliar pada tahun 2020, dengan jumlah pekerjaan terkait pariwisata yang sesuai naik dari 293,700 menjadi 1,49 juta.¹¹

Tujuan dan target ini pun sudah tercapai, yang dibuktikan dengan laporan dari Asian Development Bank yang dibuat oleh Steven Schipani dengan judul “*Myanmar Tourism Master Plan: Technical Assistance Completion Report*”. Adapun isi dari laporan tersebut adalah mengenai keberhasilan implementasi dari *Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020*.¹² Selain itu, juga ada penelitian yang menyatakan bahwa *Myanmar Tourism Master Plan* merupakan salah satu rencana pariwisata paling maju di ASEAN.¹³ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai Strategi Pemerintah Myanmar Dalam Mewujudkan Master Plan Pariwisata 2013-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Myanmar merupakan salah satu negara ASEAN yang sedang mengembangkan sektor pariwisatanya. Hal ini dilakukan Myanmar sehubungan dengan rendahnya angka kunjungan wisatawan ke Myanmar dibanding negara ASEAN lainnya, dimana Myanmar menjadi negara dengan angka kunjungan wisatawan terendah kedua di ASEAN sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Seiring berjalannya waktu, sektor pariwisata Myanmar pun mulai mengalami pertumbuhan dan telah ditetapkan sebagai sector prioritas dalam “Strategi Ekspor” Pemerintah Myanmar.

Myanmar adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang rawan konflik. Ketidakstabilan yang terjadi di Myanmar tidak menjamin kepuasan wisatawan

¹¹ Sitta Kongsasana, hal. 6

¹² Steven Schipani, “*Myanmar Tourism Master Plan: Technical Assistance Completion Report*”, Asian Development Bank (2012), hal. 1-2

¹³ Sitta Kongsasana, hal. 13

karena akan mengurangi akses wisatawan ke daerah yang ingin mereka datangi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Myanmar telah memprioritaskan pengembangan pariwisata dalam Kerangka Reformasi Ekonomi dan Sosialnya dengan mengeluarkan Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020, yang berkolaborasi dengan Pemerintah Norwegia dan *Asian Development Bank*. Laporan dari ADB pun menunjukkan bahwa *Myanmar Tourism Master Plan* 2013-2020 telah berhasil dan menjadi salah satu rencana pariwisata paling maju di ASEAN. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji mengenai bagaimana strategi Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan *Tourism Master Plan* 2013-2020.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah: **“Bagaimana strategi pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan 2013-2020?”**

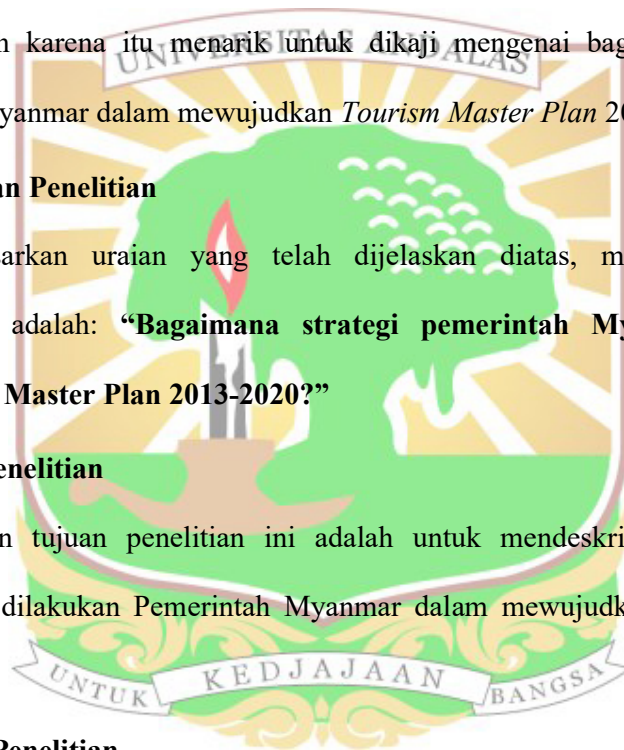
1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi-strategi yang dilakukan Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan 2013-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional dengan membahas isu pertumbuhan pariwisata di suatu negara.



2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terkait perkembangan sektor pariwisata khususnya di Myanmar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain terkait strategi yang dilakukan Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan 2013-2020.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis permasalahan yang diangkat, penulis mencoba mengumpulkan dan menelaah beberapa penelitian sebagai kajian pustaka yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini.

Penelitian pertama adalah artikel yang ditulis oleh Michalon Martin dengan judul “Tourism(s) and the way to Democracy in Myanmar”. Artikel ini dipublikasikan oleh *Asian Journal of Tourism Research* Vol. 2, No. 1 pada tahun 2017. Artikel ini membahas perkembangan pariwisata Myanmar sejak zaman kolonialisme, pasca kemerdekaan, dan terjadinya transisi politik. Titik awal perkembangan pariwisata di Myanmar terjadi pada tahun 1988 hingga 2010, dimana rezim militer baru mulai membuka Myanmar untuk menarik mata uang asing dan mengembalikan citra negaranya di panggung internasional melalui kebijakan proaktif dengan menyelenggarakan *Visit Myanmar Year* pada tahun 1996 dan dengan adanya pembangunan infrastruktur dasar.¹⁴

Analisis diakronis pariwisata di Myanmar menggambarkan dengan sangat baik seberapa dekat pariwisata dan politik telah dikaitkan di Myanmar, seperti

¹⁴Michalon Martin, “Tourism(s) and the way to Democracy in Myanmar”, *Journal of Tourism Research* Vol. 2, No. 1 (2017)

adanya pembatasan pariwisata selama era isolasionis Ne Win (1962-1988), dan promosi pariwisata untuk keuntungan politik dan pribadi selama periode Than Shwe (1988-2010). Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan dan rentang waktu penelitian mengenai perkembangan pariwisata di Myanmar. Fokus pembahasan artikel ini adalah mengenai kaitan antara demokrasi dan pariwisata di Myanmar, dimana rentang waktu penelitiannya adalah sejak masa penjajahan hingga tahun 2016, sedangkan fokus pembahasan penelitian ini adalah pada strategi Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan, dimana rentang waktu penelitiannya yaitu dari tahun 2013 hingga 2020.

Penelitian kedua adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Sitta Kongsasana, dengan judul “The Study of Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis dan mendiskusikan Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020 (MTMP) melalui paradigma pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah Myanmar sendiri telah berjanji untuk menjadikan Myanmar sebagai “tempat yang lebih baik untuk hidup, tempat yang lebih baik untuk dikunjungi” dengan mengadopsi Pendekatan Pariwisata Bertanggung Jawab atau dikenal dengan *Responsible Tourism* sebagai inti dari prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Master Plan ini telah visioner dan dibangun dengan baik dengan pendekatan pariwisata berkelanjutan strategis yang telah terintegrasi. Namun, banyak tantangan dari pengaruh internal maupun eksternal yang mungkin menghambat implementasi dari Master Plan ini. Pada

¹⁵ Sitta Kongsasana, “The study of Myanmar Tourism Master Plan 2013 – 2020”, Silpakorn University (2014)

titik ini, Master Plan dianggap sebagai salah satu rencana pariwisata paling maju di ASEAN yang menunggu implementasi dan hasil dampaknya di masa depan. Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan, dimana artikel ini fokus pada seluk beluk MTMP yang bercerita mengenai kebijakan *sustainable tourism*, pendekatan “*Development First*” dan “*Tourism First*” dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan *responsible tourism planning*. Sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana strategi Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan 2013-2020 sehingga berhasil.

Penelitian ketiga adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Michalon Martin dengan judul “*Domestic Tourism and its spatiality in Myanmar: a dynamic and geographical vision*”. Artikel ini dipublikasikan oleh Asian Journal of Tourism Research Vol. 3, No. 1, pada Juni 2018. Artikel ini membahas mengenai dinamika pariwisata lokal di Myanmar yang dipengaruhi oleh integrasi kawasan dan globalisasi. Analisis statistik, wawancara mendalam dan observasi lapangan di Negara Bagian Shan Selatan menunjukkan bahwa pada awalnya pariwisata domestik di Myanmar menampilkan serangkaian praktik dan perilaku yang cukup dekat dengan kegiatan “*pray, pay and play*” (berdoa, membayar, dan bermain). Selain itu, system pariwisata domestik bergantung pada jaringan pemangku kepentingan (agen perjalanan, penjual, pengemudi perahu); ziarah dan festival menghasilkan ruang sementara (pagoda, pasar) dan struktur wilayah abadi (desa pengemudi perahu).¹⁶

¹⁶ Michalon Martin, “Domestic Tourism and its spatiality in Myanmar: a dynamic and geographical vision”, Asian Journal of Tourism Research Vol. 3, No. 1, (2018)

Namun sejak terjadinya transisi politik pada 2010, praktik pariwisata di Myanmar telah berganti haluan dari yang dikenal dengan “wisata religius” menjadi “wisata modern”. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan *open door* yang telah menjadi kekuatan pendorong masuknya globalisasi dan hedonisme. Praktik hedonistik yang lebih individual ini mendapatkan legitimasi dan hibridisasi kerangka kerja tradisional dan modalitas perjalanan modern. Pariwisata yang lebih modern ini member cahaya baru pada pariwisata domestik yang tidak banyak diketahui di Myanmar. Oleh karena itu, pariwisata domestik Myanmar pun saat ini lebih mengarah pada aktivitas yang dilakukan generasi milenial seperti berenang, mandi di air terjun, dan lain-lain. Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian penulis terletak pada topik yang dibahas, dimana artikel ini meneliti mengenai perkembangan dan perubahan kegiatan yang dilakukan saat berpariwisata di Myanmar, sedangkan penelitian penulis membahas topik *Master Plan* yang dicanangkan Pemerintah Myanmar dalam mengembangkan sektor pariwisata Myanmar.

Penelitian keempat adalah sebuah artikel yang berjudul “*Tourism Development in Burma*” yang ditulis oleh Linnéa Hörmander pada 2013. Artikel ini memaparkan informasi mengenai pariwisata berkelanjutan. Masalah utama yang dibahas adalah dampak yang akan ditimbulkan dari penetapan tujuan wisata baru terhadap negara berkembang, dalam hal ini terhadap Myanmar. Selain itu, artikel ini juga membahas isu meningkatnya persaingan berbagai negara untuk menarik perusahaan wisata karena manfaat pariwisata menguntungkan bagi

pembangunan negara. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah *definiton of tourism* dan *impact of tourism*.¹⁷

Adapun dampak positif yang dihasilkan dari pariwisata di negara berkembang adalah luasnya lapangan pekerjaan karena adanya pembangunan, meningkatnya angka penjualan dan pendapatan negara, serta adanya kemungkinan untuk interaksi antar budaya yang akan menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya, norma, dan nilai dari negara lain. Disisi lain, dampak negatif dari pariwisata di negara berkembang yaitu meningkatnya harga barang dan biaya hidup yang dapat menyebabkan rendahnya standar hidup bagi penduduk yang berpendapatan kecil, munculnya ketimpangan sosial, adanya perbedaan sikap dan tujuan dari masyarakat Myanmar, karena ada sebagian yang mendapat pengalaman baru dari wisatawan dan ada yang tidak. Dengan membandingkan dampak positif dan negatif dari pariwisata, terbukti bahwa perusahaan wisata yang membuka lapangan pekerjaan juga dapat berkontribusi terhadap kesenjangan sosial yang lebih luas karena manfaat ekonominya tidak diterima penduduk secara merata.

Penelitian kelima adalah sebuah artikel yang berjudul “*Responsible Tourism in Myanmar: Current Situation and Challenges*” yang ditulis oleh Ko Ko Thett pada 2012. Artikel ini berisikan pemaparan mengenai situasi terbaru dan tantangan dari pelaksanaan *Responsible Tourism* atau pariwisata yang bertanggung jawab di Myanmar. Pariwisata bertanggung jawab dalam hal ini adalah bertanggung jawab atas adanya transisi ekonomi, yang sebagian besar berada di sektor ekonomi primer. Adapun yang bertanggung jawab ialah

¹⁷ Linnéa Hörmander, “*Tourism Development in Burma*”, Department of Business Administration, University of Gothenburg (2013)

Pemerintah Myanmar dengan memprioritaskan pariwisata dalam agenda pembangunan nasional, terutama untuk mendapatkan mata uang asing, untuk meningkatkan citra negara, dan untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.¹⁸

Dalam artikel ini dikatakan bahwa Myanmar telah membuktikan validitas anggapan bahwa “pariwisata adalah bagian dari globalisasi, walaupun merupakan varian yang agak istimewa”. Untuk menyukseskan seluruh proyek Pariwisata bertanggung jawab, Pemerintah Myanmar telah menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan, khususnya Kementerian terkait pariwisata, para pelaku bisnis seperti operator *tour travel*, pemilik hotel, dan agen perjalanan, NGO, dll. Tulisan ini akan berkontribusi dalam memberi pemahaman pada penulis mengenai kebijakan *Responsible Tourism* yang ditetapkan Pemerintah Myanmar dalam sektor pariwisatanya serta kaitannya dengan hak asasi manusia dan kapitalisme.

Kelima penelitian diatas memiliki keterkaitan dengan isu yang akan penulis teliti, sehingga penulis bisa mengumpulkan informasi terkait pariwisata di Myanmar, kebijakan Pemerintah Myanmar dalam sektor pariwisata, dampak yang dihasilkan dari berkembangnya sektor pariwisata di Myanmar dan berbagai data relevan lainnya yang akan dijadikan referensi dalam penelitian mengenai strategi Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan 2013-2020.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Sustainable Tourism*

Pariwisata adalah salah satu industri global terbesar, dengan sebagian besar pasar yang tumbuh terfokus di sekitar lingkungan alami murni seperti

¹⁸ Ko Ko Thett, “*Responsible Tourism in Myanmar: Current Situation and Challenges*”, Burma Center Prague (2012)

kawasan lindung pesisir dan laut. Kawasan perlindungan laut semakin menarik minat pengunjung asing, serta penduduk lokal. Pariwisata dapat memberi manfaat bagi masyarakat lokal dan kawasan perlindungan laut melalui peningkatan pendapatan dan pekerjaan. Namun, pariwisata juga dapat mengancam sumber daya kawasan perlindungan laut dengan menghancurkan habitat, mengganggu satwa liar, mempengaruhi kualitas air, dan mengancam masyarakat dengan terlalu mengembangkan, berkerumun, dan mengganggu budaya lokal.¹⁹ Oleh karena itu, muncullah konsep *Sustainable Tourism* atau Pariwisata Berkelanjutan.

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang meminimalkan biaya dan memaksimalkan manfaat pariwisata untuk lingkungan alam dan masyarakat setempat, dan dapat dilakukan tanpa batas waktu tanpa merusak sumber daya yang menjadi sandarannya. Pariwisata berkelanjutan sengaja direncanakan untuk memberi manfaat bagi penduduk lokal, menghormati budaya lokal, melestarikan sumber daya alam, mengarahkan lebih banyak keuntungan kepada masyarakat lokal dan kawasan perlindungan laut, serta mendidik turis dan penduduk setempat tentang pentingnya konservasi.²⁰

Komunitas lokal, NGO, dan industri pariwisata semuanya perlu berkolaborasi untuk membantu menghasilkan perusahaan pariwisata berkelanjutan yang menguntungkan secara lokal dan juga layak secara ekonomi. Langkah pertama adalah “*visioning*”, yaitu mengembangkan visi situasi pariwisata terbaik untuk komunitas setempat dan kawasan perlindungan laut. Sebagaimana pengertian pariwisata berkelanjutan yang dipaparkan oleh *World Conservation Union* yaitu:

¹⁹US Department of Commerce, “Sustainable Tourism Concepts”, National Marine Sanctuaries hal. 3

²⁰ US Department of Commerce, hal. 3

“Sustainable tourism is environmentally responsible travel and visitation to natural areas, in order to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural features, both past and present) in a way that promotes conservation, has a low visitor impact, and provides for beneficially active socio-economic involvement of local peoples.”²¹

Pariwisata telah menjadi kegiatan ekonomi penting di dalam dan di sekitar kawasan perlindungan laut dan kawasan lindung lainnya di seluruh dunia. Program pariwisata berkelanjutan yang terencana dengan baik memberikan peluang bagi pengunjung untuk memasuki area alami dan komunitas manusia, serta belajar tentang pentingnya konservasi laut dan budaya lokal. Selain itu, kegiatan pariwisata berkelanjutan dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal. Pariwisata berkelanjutan sangat menjanjikan sebagai mekanisme utama bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya lingkungan dan keanekaragaman hayati kawasan perlindungan laut, sehingga mereka dapat termotivasi untuk melestarikan sumber daya tersebut.²²

Pariwisata berkelanjutan memiliki tiga komponen utama, yang disebut sebagai “*triple bottom line*”, yaitu:²³

1. *Environmentally* atau secara lingkungan, kegiatan tersebut berdampak rendah terhadap sumber daya alam, khususnya di kawasan lindung. Ini bertujuan untuk meminimalkan kerusakan pada lingkungan (flora, fauna, habitat, air, sumber daya kehidupan laut, penggunaan energi, kontaminasi, dll). Dan idealnya mencoba member manfaat bagi lingkungan.
2. *Socially and culturally* atau secara sosial dan budaya, kegiatan tersebut tidak merusak struktur sosial atau budaya masyarakat di komunitas yang

²¹ US Department of Commerce, hal. 4

²² US Department of Commerce, hal. 4

²³ US Department of Commerce, hal. 4

menjadi tempat pariwisata. Sebaliknya, kegiatan pariwisata tersebut harus menghormati budaya dan tradisi lokal. Komponen ini melibatkan para pemangku kepentingan (individu, masyarakat, *operator tour*, lembaga pemerintah) dalam semua fase perencanaan, pengembangan, dan pemantauan, dan mengedukasi para pemangku kepentingan tentang peran mereka.

3. *Economically* atau secara ekonomi, pariwisata berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dan merata untuk masyarakat lokal dan sebanyak mungkin pemangku kepentingan lainnya.

Usaha pariwisata yang mengetengahkan ketiga prinsip ini akan “berhasil dengan berbuat baik”. Maksudnya yaitu dalam menjalankan bisnis pariwisata yang sedemikian rupa ini, mereka yang terlibat tidak akan merusak sumber daya alam, budaya, atau ekonomi, tetapi lebih pada mendorong apresiasi terhadap sumberdaya yang sangat bergantung pada pariwisata. Bisnis yang dijalankan dengan tiga prinsip ini dapat meningkatkan konservasi sumber daya alam, membawa apresiasi nilai-nilai budaya, membawa pendapatan kemasyarakat, dan menjadi menguntungkan.²⁴

Adapun ciri-ciri dari pariwisata berkelanjutan yaitu sebagai berikut: (1) Direncanakan dengan tiga tujuan: laba, lingkungan, dan masyarakat, (2) Biasanya direncanakan terlebih dahulu dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan, (3) Berorientasi lokal, (4) Terkendali secara lokal, setidaknya sebagian, (5) Fokus pada pengalaman pendidikan, (6) Konservasi sumber daya alam menjadi prioritas,

²⁴ US Department of Commerce, hal. 5

(7) Penghargaan untuk budaya local sebagai prioritas, (8) Lebih banyak pendapatan tetap dengan masyarakat lokal dan kawasan perlindungan laut.²⁵

Dari pemaparan tersebut, pariwisata konvensional belum tentu direncanakan untuk meningkatkan konservasi atau pendidikan, tidak menguntungkan masyarakat setempat, dan dapat dengan cepat merusak lingkungan yang rapuh, atau secara tak terduga mengubah sumberdaya dan budaya yang menjadi sandarannya. Sebaliknya, pariwisata berkelanjutan sengaja direncanakan sejak awal untuk member manfaat bagi penduduk setempat, menghormati budaya lokal, melestarikan sumber daya alam, dan mendidik baik wisatawan maupun penduduk setempat. Pariwisata berkelanjutan dapat menghasilkan keuntungan yang sama dengan pariwisata konvensional, tetapi lebih banyak keuntungan tetap bersama masyarakat setempat, dan sumber daya alam dan budaya daerah tersebut dapat dilindungi. Dalam banyak kasus, praktik pariwisata konvensional di masa lalu telah menjadi ancaman utama bagi konservasi laut karena kurangnya control manajemen dan mekanisme perencanaan yang efektif. Di sisi lain, pariwisata berkelanjutan berupaya meminimalkan dampak negatif pariwisata, dengan berkontribusi pada konservasi dan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.²⁶

Tiga komponen utama dan ciri-ciri dari pariwisata berkelanjutan diatas akan menjadi acuan bagi penulis dalam menggambarkan dan menganalisa strategi yang dilakukan Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan 2013-2020.

²⁵ US Department of Commerce, hal. 5

²⁶ US Department of Commerce, hal. 5

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif berkenaan dengan data yang terdiri dari kata-kata atau lebih bersifat naratif dan bukan angka.²⁷ Penulis menggunakan pendekatan ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang detail mengenai fokus utama dalam kajian penelitian yaitu Strategi Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan 2013-2020.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengacu pada pendeskripsian strategi yang dilakukan Myanmar dalam rangka mewujudkan *Myanmar Tourism Master Plan* 2013-2020. Penulis akan menginterpretasikan data-data yang didapat dari hasil pencarian di berbagai macam sumber seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah, laporan resmi pemerintah dan lembaga terkait, serta situs yang relevan dengan pembahasan penelitian ini sehingga menghasilkan argumen atau tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.2 Batas Penelitian

Penulis memberikan batasan pada obyek yang diteliti yaitu pada strategi yang dilakukan Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan 2013-2020. Rentang waktu yang penulis gunakan dalam menganalisis strategi Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan adalah dari tahun 2013 hingga 2020, dimana pada rentang tahun tersebut mulai dijalankan berbagai program strategis, proyek prioritas, dan rencana aksi jangka panjang terkait sektor pariwisata di Myanmar melalui *Myanmar Tourism Master Plan* 2013-2020.

²⁷Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: Alfabeta (2017), hal. 3

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan dan diteliti dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Pemerintah Myanmar, sedangkan unit ekplanasinya adalah Master Plan 2013-2020 dan tingkat analisisnya berada di level sistem internasional karena disini terdapat interaksi antara Myanmar dengan pihak asing seperti lembaga di kawasan (ASEAN), negara dan pemerintah lain (Pemerintah Norwegia), NGO, dan sebagainya dalam mengembangkan *Myanmar Tourism Master Plan*.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *library research* atau studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, literatur, dokumen resmi, laporan, dan bacaan lain yang dapat dijadikan pedoman untuk mendapatkan sekumpulan data yang akurat dan bermanfaat serta erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Data yang dicari berdasarkan kata kunci penelitian yaitu Myanmar dan Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020.

Adapun data yang akan dikumpulkan adalah laporan resmi dari Pemerintah Norwegia, laporan resmi dari Asian Development Bank (ADB), dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan *Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020* dan strategi yang dijalankan Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan 2013-2020.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Pada penulisan ini, pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber data yang telah diseleksi sehingga relevan terhadap isu penelitian dan tercapainya tujuan dari penelitian. Data-data yang berasal dari buku, jurnal, artikel, laporan dan dokumen resmi tersebut dikumpulkan melalui serangkaian kegiatan observasi. Data-data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan cara menetapkan, menjabarkan, dan merangkai alur sebab-akibat dengan memilah dan memilih data yang terpenting dan sesuai dengan penelitian. Kemudian data dan fakta yang ada dicocokkan dan dianalisis dengan konsep yang telah ditentukan, yaitu konsep *Sustainable Tourism* yang memiliki komponen “*triple bottom line*”, diantaranya *environmentally, socially and culturally*, dan *economically* sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.²⁸

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II SEKTOR PARIWISATA DI MYANMAR

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai sektor pariwisata di Myanmar termasuk gambaran latar belakang masuknya pariwisata di Myanmar, pengaruh globalisasi terhadap pariwisata di Myanmar, jenis-jenis pariwisata di

²⁸Barbara B. Kawulich, “*Data Analysis Techniques in Qualitative Research*,” *Journal of Research in Education*, Vol. 14, No. 1 (2004), hal. 97

Myanmar, kebijakan pariwisata di Myanmar dan dampak ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata Myanmar.

BAB III MYANMAR TOURISM MASTER PLAN

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum Master Plan yang dicanangkan di Myanmar, Master Plan jangka pendek (Master Plan 2013-2015), dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan.

BAB IV STRATEGI PEMERINTAH MYANMAR DALAM MEWUJUDKAN MASTER PLAN 2013-2020

Bab ini akan menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dalam mewujudkan Master Plan 2013-2020 melalui kerja sama dengan aktor-aktor lain. Bab ini juga menjelaskan keberhasilan Myanmar dalam mengembangkan sektor pariwisatanya melalui Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini akan berisi ringkasan atau rangkuman dari keseluruhan penjelasan dan pembahasan dari bab 1 hingga bab 4 yang telah disampaikan diatas.

